

# Patologi Ekonomi Politik Masyarakat Modern dalam Trilogi Novel *Negeri Para Bedebah* Karya Tere Liye

Nizar Halimatus Sa'diyah <sup>1</sup>

Moch. Syahri <sup>2</sup>

Nita Widiati <sup>3</sup>

<sup>123</sup> Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang

<sup>1</sup> [nihasa.98@gmail.com](mailto:nihasa.98@gmail.com)

<sup>2</sup> [moch.syahri.fs@um.ac.id](mailto:moch.syahri.fs@um.ac.id)

<sup>3</sup> [nita.widiati.fs@um.ac.id](mailto:nita.widiati.fs@um.ac.id)

## Abstrak

Permasalahan sosiokultural dalam setiap lapisan masyarakat klasik hingga modern berkisar seputar ekonomi dan politik. Novel berbanding lurus dengan realitas sosiokultural yang dikandung masyarakat. Novel berpotensi pula sebagai media pemahaman budaya suatu daerah ataupun negara. Penelitian ini memiliki tujuan memberi penjelasan mengenai bentuk patologi ekonomi dan politik pada masyarakat modern dalam novel-novel karya Tere Liye. Novel-novel yang diteliti berjudul *Negeri Para Bedebah*, *Negeri di Ujung Tanduk*, dan *Bedebah di Ujung Tanduk*. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data penelitian ini berupa kalimat-kalimat kutipan yang diperoleh dari teks trilogi novel. Penelitian ini juga didukung oleh informasi tekstual tentang bentuk-bentuk patologi ekonomi dan politik dalam praktik sosiokultural. Teknik pengumpulan data dengan cara baca dan catat. Analisis data menggunakan teknik analisis isi dokumen menurut Krippendorff. Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut. Pertama, bentuk patologi ekonomi terdiri dari (1) *rush money*, (2) *shadow economy*, (3) inflasi, dan (4) pasar *non-riil*. Kedua, bentuk patologi politik terdiri dari (1) transaksi politik, (2) penyalahgunaan kekuasaan, (3) konflik kepentingan, dan (4) manipulasi dan kamufle penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa patologi ekonomi dan politik yang terjadi dalam masyarakat modern memiliki keterkaitan yang sangat kompleks dan dinamis sehingga diperlukan koalisi antar instansi penegak hukum.

**Kata Kunci:** Patologi Ekonomi, Patologi Politik, Masyarakat Modern, Trilogi Novel

## Pendahuluan

Patologi sosial memiliki pelbagai pemicu. Makbul dan Sussang (2021) menyebutkan bahwa penyakit sosial (sosiopatik) merupakan konsekuensi yang tidak diinginkan dari sistem sosial budaya saat ini. Latar belakang munculnya kekacauan sosial saat ini tidak lain disebabkan oleh faktor politik serta ekonomi tidak stabil sebagai faktor klasik. Oleh karena itu, berdasarkan faktor-faktor penyebab kekacauan sosial pada penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi patologi politik dan patologi ekonomi. Selain itu, Burlian (2016) memaparkan bahwa sesungguhnya politik, agama, sosial budaya, dan ekonomi memiliki keterkaitan dalam memengaruhi kekacauan sosial. Sesuai dengan pernyataan dari kelompok interaksionis tersebut, faktor-faktor klasik berdampak pada timbulnya interaksi bersifat dinamis dan dapat mempengaruhi perilaku manusia yang kemudian menimbulkan kekacauan sistem sosial.

Patologi sosial timbul sebagai dampak rusaknya sistem sosial yang seharusnya dijalankan dengan baik. Giddens memahami sistem sosial sebagai *any, especially a relatively persistent, patterning of social relations across time-space, understood as reproduced practices* (Kistanto, 2008) yang berarti bahwa setiap masyarakat dengan

kelompok sosialnya memiliki subsistem dengan sistematis, fungsional, dan juga beragam. Sumber utama penyebab rusaknya sistem sosial dalam masyarakat modern ditandai oleh faktor ekonomi dan politik, sehingga penelitian ini berfokus pada hal tersebut. Kehidupan memang dinamis, namun ketidakstabilan sistem dapat diidentifikasi melalui ilmu patologi sehingga muncul istilah patologi ekonomi dan patologi politik. Penelitian ini juga menekankan pada masyarakat modern karena sifatnya yang individual, proaktif, dan kompetitif. Masyarakat modern seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka tidak dapat mengenali secara pasti di mana tempat hinggap yang seharusnya (Syuhada, 2017). Dengan demikian, pengkajian terhadap patologi ekonomi dan politik pada masyarakat modern penting dilakukan untuk mengantisipasi masalah kehidupan selanjutnya.

Penelitian ini menjadikan novel sebagai objek kajian karena dinilai memiliki potensi lebih untuk menyampaikan konflik. Konflik sosial yang ditampilkan Tere Liye dalam triloginya sangat bervariasi, akan tetapi lebih berfokus pada patologi politik dan ekonomi. Sejalan dengan itu, Nurgiyantoro (2015) menjelaskan bahwa novel mempunyai kemampuan guna menggambarkan alur cerita secara lebih bervariasi, bebas, rinci, detail, sekaligus kompleks. Dalam wacana lain, Nurgiyantoro (2013) juga memaparkan bahwa novel berpotensi menghadirkan jenis tokoh dengan karakter lebih beragam meskipun hanya sifat-sifat tertentu yang ditonjolkan dan bersifat statis ataupun berkembang. Aspek-aspek lain juga ditampilkan secara rinci sehingga terkesan lebih meyakinkan dan realistik terhadap kehidupan nyata. Alur cerita yang panjang, memberi berbagai macam kemungkinan kepada pembaca dalam menafsirkan cerita secara bervariasi. Oleh karena itu, menjadikan novel sebagai objek penelitian sangat cocok karena berperan sebagai artifisial patologi sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, sangat efektif jika mengidentifikasi bentuk-bentuk patologi sosial melalui karya sastra.

Persoalan manusia tidak akan pernah habis untuk dibahas. Stratifikasi sosial dan proses produksi membawa kesenjangan antarkelompok sehingga berdatangan beragam kasus. Ogburn dan Nimkoff mengatakan "*Change is inevitable, but it is not always favorable. There are forces of work in every society leading to the breakdown of the established organizations and of the disruption of their function, producing what are known as social problems*" yang artinya perubahan sosial masyarakat ditandai dari berubahnya sistem politik, berkesinambungan pada sistem ekonomi, dan berakhir pada tatanan budaya (Utari dan Prawironegoro, 2017). Artinya, berubahnya sistem politik berimbas pada bertukarnya gaya berpikir dan perilaku masyarakat. Menurut Aris (dalam Berliana, dkk., 2021) menunjukkan bahwa karya sastra yang baik menekankan unsur pengetahuan multidisiplin seperti ilmu alam, sosial, hukum, psikologi, ekologi dan bidang lainnya. Kandungan unsur ilmu pengetahuan interdisipliner harus menjadi komponen penting dan menarik untuk diolah dalam sebuah karya sastra. Komponen-komponen pengetahuan lain juga dapat digunakan untuk memperkuat isi kandungan karya sastra yang berhubungan dengan pesan moral dan wawasan yang ingin disampaikan pengarang kepada khalayak atau pembaca sastra.

Tere Liye banyak mengambil realitas kehidupan masyarakat Indonesia, ilmu-ilmu ekonomi yang dipelajari di bangku kuliah, pengalaman menulis esai ekonomi politik yang sering dimuat KOMPAS, ditambah *skill* menulis yang diasah mulai umur 11 tahun, Tere Liye menuangkan potret kehidupan masyarakat seputar kekuasaan, politik, kapitalis, ekonomi, dan lainnya dalam trilogi novelnya sehingga dapat dijadikan sebagai media hiburan sekaligus refleksi terhadap kehidupan yang semakin penuh persaingan dan mencekam. Berbagai pihak ikut andil dalam persaingan politik mulai dari pejabat,

pengusaha, dan bahkan konsultan sekalipun. Hal-hal tersebut menimbulkan adanya patologi sosial dan gejala hidup dalam masyarakat yang mana direpresentasikan melalui karya sastra. Jumpa Pengarang Tere Liye (Pontianak, 2022) yang diselenggarakan oleh Gramedia Pontianak, Tere Liye mengungkapkan pada mulanya ia merupakan penulis esai ekonomi politik KOMPAS selama 2 hingga 3 tahun kemudian banting setir menulis novel karena merasa tidak menemukan jawaban apapun ketika menulis esai.

Karya-karya Tere Liye menarik untuk dikaji karena alur dan konflik yang ditampilkan sangat sesuai dengan kehidupan nyata meski diselipkan cerita fiksinya sehingga secara tidak langsung mengajak pembaca lebih cermat menanggapi berbagai kasus sosial yang beredar di masyarakat. Tere Liye mampu mengemas potret gejala sekaligus masalah sosial yang sedang ditempa masyarakat menjadi alur cerita yang menarik dengan menyisipkan nilai-nilai pendidikan moral secara tersurat maupun tersirat sehingga tidak terkesan kaku dan membosankan. Banyak penelitian mengenai patologi sosial telah dilakukan. Akan tetapi, masih diperlukan banyak penelitian lagi karena patologi sosial yang dialami oleh masyarakat senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan peradaban masyarakatnya. Setiap novel yang membahas patologi sosial, selalu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat ketika karya tersebut dilahirkan. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) juga turut andil dalam munculnya patologi sosial. Selain itu, pada dasarnya sastra menurut Sugiarti (2019), tidak dapat dipisahkan dari fenomena gejala sosial yang dialami oleh masyarakat. Gejala-gejala tersebut bukanlah realitas tunggal maupun mekanisme yang bebas dari kompleksitas sistem makna.

Posisi penelitian ini terletak pada pengungkapan bentuk-bentuk patologi ekonomi dan politik yang ada di dalam trilogi novel berjudul *Negeri Para Bedebah*, *Negeri di Ujung Tanduk*, dan *Bedebah di Ujung Tanduk* karya Tere Liye. Hasil penelitian ini disambungkan dengan pemanfaatan trilogi novel sebagai salah satu media refleksi yang tidak kaku. Diharapkan melalui penelitian ini, dapat memperkaya khazanah kesusastraan Indonesia dan memperkaya kajian teoretis sastra Indonesia sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

Penelitian terdahulu yang mengkaji trilogi novel ini pernah dilakukan oleh Nuswantaria (2019) berjudul *Analisis Hegemoni dalam Dwiologi Novel Negeri Para Bedebah Karya Tere Liye (Perspektif Antonio Gramsci)*. Hasilnya bahwa hegemoni yang digambarkan tokoh di dalam novel mencakup secara ekonomi maupun politik. Persamaan penelitian terletak pada objek novel berjudul *Negeri Para Bedebah* dan *Negeri di Ujung Tanduk* karya Tere Liye. Perbedaan terletak pada kajian penelitian Nuswantaria membahas analisis hegemoni dalam prespektif Antonio Gramsci, sedangkan penelitian ini mengkaji bentuk patologi ekonomi dan politik dalam klasifikasi Makbul. Penelitian relevan juga dilakukan oleh Megawulandari, Rafli, dan Rohman (2019) dengan judul *Patologi Sosial dalam Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu* Karya Tere Liye. Hasil penelitian menunjukkan patologi sosial seperti korupsi, perjuadian, kriminalitas, minuman keras, dan prostitusi. Persamaan penelitian yakni mendeskripsikan patologi sosial pada novel karya Tere Liye. Perbedaannya terletak pada penelitian tersebut memakai sumber data novel *Rembulan Tenggelam di Wajahmu*. Sedangkan penelitian ini bersumber dari trilogi novel berjudul *Negeri Para Bedebah*, *Bedebah di Ujung Tanduk*, dan *Negeri di Ujung Tanduk*. Sedangkan penelitian yang berfokus pada kajian patologi ekonomi dan politik dalam novel belum ditemukan. Sejauh ini, penelitian terdahulu hanya mengambil masyarakat sebagai objek seperti penelitian yang dilakukan oleh Darsono dan Aprillia (2020) dengan judul *Patologi*

*Pembangunan Etika Politik Pascareformasi dalam Perspektif Poststrukturalis-Hipersemiotik.* Hasil dari penelitian ini menunjukkan kritik penegasan atas fenomena yang selama ini dikuasai kapitalisme-modernis dengan menguasai dan memanajemen ideologi masa dengan jalan oligarki kekuasaan dan jargon-jargon pembangunan. Simbol anomali yang beredar tertuju pada sektor pendidikan, kesehatan, hukum, politik, dan ekonomi. Persamaan dengan penelitian ini pada payung kajian patologi sosial. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tujuan dan objek penelitian.

## Metode

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis untuk menganalisa sebuah fenomena dengan metode analisis isi. Data dalam penelitian ini berupa kutipan langsung berbentuk kalimat dan konteks. Sumber data dalam penelitian ini berupa isi teks trilogi novel karya Tere Liye yang berjudul *Negeri Para Bedebah*, *Negeri di Ujung Tanduk*, dan *Bedebah di Ujung Tanduk*. Sumber data dipilih berdasarkan beberapa alasan. Pertama, menurut Sya'ban dan Tike (2022), trilogi novel karya Tere Liye cenderung menyajikan fenomena yang sangat dekat dengan realitas sosial masyarakat sehingga tidak sukar untuk dicerna dan diinterpretasikan. Kedua, menurut Yuniar, dkk. (2023), secara keseluruhan karya Tere Liye termasuk jenis novel dalam kategori *best seller*, termasuk trilogi berjudul *Negeri Para Bedebah*, *Negeri di Ujung Tanduk*, dan *Bedebah di Ujung Tanduk*. Ketiga, menurut Prasetya (2016), Tere Liye memiliki banyak penghargaan kepenulisan seperti IKAPI Award tahun 2016 kategori *Writer of The Year* dan menurut Pratiwi (2017), apresiasi Islamic Book Award tahun 2017 sebagai buku Islami terbaik dengan genre fiksi dewasa acara Islamic Book Fair (IBF) ke-16.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian isi trilogi novel karya Tere Liye adalah teknik baca dan catat. Menurut Sanjaya, dkk. (2021), teknik baca dan catat digunakan untuk mengungkap suatu masalah dalam sebuah wacana. Adapun prosedur yang digunakan yakni (1) membaca secara cermat dan berulang-ulang isi trilogi novel, (2) menelaah secara kritis, tajam, dan cermat isi kandungan makna trilogi novel, (3) mengklasifikasikan bentuk patologi ekonomi dan politik dalam trilogi novel, dan (4) mencatat dan memasukkan data-data kutipan trilogi novel berdasarkan klasifikasinya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori analisis isi menurut Krippendorff (dalam Adnjani, 2011), merupakan sebuah teknik penelitian guna membuat inferensi dan kebenaran data dengan mempertimbangkan konteksnya. Cara kerja analisis isi dokumen melalui beberapa tahap yakni (1) mereduksi data kutipan sesuai kategori indikator yang didasarkan pada deskriptor penelitian dalam teori, (2) memaparkan dan menganalisis bentuk patologi ekonomi, (3) memaparkan dan menganalisis bentuk patologi politik, dan (4) menyimpulkan hasil analisis temuan.

## Hasil

Penelitian ini menjelaskan bentuk-bentuk patologi ekonomi dan politik yang dialami oleh masyarakat modern dalam trilogi novel berjudul *Negeri Para Bedebah*, *Negeri di Ujung Tanduk*, dan *Bedebah di Ujung Tanduk* karya Tere Liye. Analisis yang dilakukan terhadap perilaku dan tindakan moral yang dilakukan oleh masyarakat modern di dalam trilogi novel. Durkheim mengklaim bahwa dalam masyarakat modern, bentuk solidaritas moral tidaklah menghilang, melainkan hanya mengalami perubahan. Masyarakat modern mengalami perkembangan kemandirian lebih cepat sebagai

dampak dari pembagian kerja yang sifatnya individual (Arif, 2020). Novel berjudul *Negeri Para Bedebah* dan *Negeri di Ujung tanduk* ini menurut Nuswantaria (2019), berisi kekuasaan, pengkhianatan, penindasan, kehormatan, balas dendam, prinsip hidup, kepedulian, persahabatan, cinta, dan persahabatan. Melalui karya tersebut, Tere Liye mengekspresikan pemikirannya secara sosial tentang politik dan ekonomi. Dewasa ini, kehidupan semakin cacat bukan karena banyak orang jahat, tetapi karena banyak orang yang lebih memilih tidak peduli. Novel tersebut menceritakan kondisi ekonomi dan politik suatu negara dengan menampilkan hegemoni yang dilakukan oleh tokoh atau kelompok satu kepada lainnya melalui intelektual dan moral. Hal tersebut mendorong kesepakatan antar tokoh atau kelompok sosial lainnya sehingga muncul sebuah dominasi.

Kajian mengenai konflik sosial masyarakat masih menjadi topik pembahasan yang hangat, urgen, dan sangat menarik untuk dibahas secara mendalam. Menurut Maghfiroh dan Zawawi (2021), hal tersebut dinilai mampu memberi perspektif analitis komprehensif kepada dimensi-dimensi konflik untuk mengetahui latar belakang, ruang lingkup, perkembangan, dan tawaran solusi terbaik guna menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Penelitian konflik sosial berkembang sesuai dengan kompleksitas masyarakat dalam kedinamisan interaksi sosial. Mempelajari konflik sosial masyarakat dianggap penting sebab tujuannya untuk memahami aspek-aspek yang mendasari masyarakat sekaligus memahami risiko masalah sosial. Konflik sosial timbul dari dinamika sosio-psikologis, misalnya dari konflik nilai, keinginan atau kebutuhan seperti perebutan kekuasaan, dan penguasaan sumber daya. Hasil dari penelitian ini ditemukan empat bentuk patologi ekonomi yaitu *rush money*, *shadow economy*, inflasi, dan pasar non-riil. Selain itu, juga ditemukan empat bentuk patologi politik yaitu transaksi politik, penyalahgunaan kekuasaan, serta konflik kepentingan. Pembahasan mengenai bentuk patologi ekonomi dan politik dijabarkan sebagai berikut.

### **Bentuk Patologi Ekonomi**

Patologi ekonomi disebabkan oleh kegagalan pembangunan ekonomi sehingga dapat dipahami dengan melihat sejauh mana konflik antara "visi" dengan hasil pragmatisme dalam pembangunan ekonomi yang sedang dan bahkan telah dilaksanakan. Misalnya, pembangunan ekonomi yang gagal tidak dapat disederhanakan hanya dengan melihat persentase lingkungan alam dari mana ia dibuat. Barbara Ward dan Buchory menyatakan bahwa "*The world is rich enough to satisfy everybody's needs, but not rich to satisfy everybody's greeds*". Rusaknya habitat lingkungan masyarakat serta munculnya wabah kemiskinan dapat menjadi tolak ukur individu masyarakat, organisasi, ataupun tingkat sosial kelompok masyarakat yang terlalu mementingkan dirinya sendiri sehingga kurang memperdulikan kehidupan kelompok sosial lain maupun generasi mendatang (Pranadji, 2002). Dengan demikian, terjadilah kesenjangan dalam pembangunan perekonomian masyarakat. Menurut Farida dan Andalas (2019), kesenjangan merupakan salah satu kondisi tidak seimbang dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sering ditemukan perbedaan sosial ekonomi dalam masyarakat. Masalah kesenjangan disebabkan perbedaan pendapatan dan perkembangan masyarakat. Kesenjangan ini antara lain dipengaruhi oleh realitas sosial ekonomi yang ada.

Patologi ekonomi memiliki beberapa definisi dan sebab musababnya. Menurut Putri (2018), patologi ekonomi dapat disebabkan adanya krisis perekonomian seperti *rush money*. Hal ini biasanya bermula dari munculnya berita hoax tentang penarikan uang secara massal oleh nasabah sehingga menimbulkan kepanikan dan terburu-buru

mengunjungi bank. Insiden *rush money* pernah dialami negara Indonesia pada tahun 1997-1998 Masehi. Kegiatan perekonomian lainnya yang menyebabkan patologi ekonomi menurut Rezky (2020), adalah *shadow economy*. Kegiatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung melibatkan penghindaran pajak sehingga secara otomatis akan berdampak pada penerimaan negara. Ketika pendapatan pemerintah turun, tentu berpengaruh terhadap kualitas maupun produksi barang dan jasa publik yang telah disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera mungkin melakukan tindakan untuk mengurangi dan mencegah adanya *shadow economy*.

Pada dasarnya, krisis perekonomian berangkat dari perangkat sistem yang kurang terkendali. Perangkat-perangkat sistem ekonomi kapitalis dapat menjadi akar penyebab munculnya patologi ekonomi. Fariyah (2014) menyebutkan bahwa secara umum, perangkat ini digunakan oleh negara-negara seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selama pilar ekonomi sebuah negara masih menjadikan perangkat kapitalis sebagai pijakannya, maka patologi ekonomi akan bermunculan menggerogoti sistem keuangan sebuah negara. Adapun perangkat kapitalis tersebut yakni (1) perbankan, (2) pasar *non-rill*, (3) pembebasan pengelolaan sumber kekayaan secara individu atau swasta, serta (4) penggunaan mata uang kertas.

### ***Rush Money***

*Rush money* merupakan penarikan uang secara besar-besaran karena kepanikan dan tidak percaya terhadap sistem perbankan. *Rush money* dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi yang semakin memburuk sebab krisis moneter. *Rush money* hanya akan membuat bank semakin rugi dan bangkrut karena sistem kerja bank hanya menyimpan sebagian kecil bentuk tunai dari uang nasabah. Jumlah uang tunai milik nasabah yang diterima oleh pihak bank memang boleh diambil sewaktu-waktu oleh para nasabah. Akan tetapi, pihak bank diperbolehkan mengelola uang tersebut seperti diputar dengan cara diinvestasikan dan dipinjamkan ke nasabah lain melalui sistem bunga. Jika nasabah berbongdong-bondong untuk mengambil uangnya, secara otomatis akan merugikan dan mengacaukan sistem keuangan bank. Hal tersebut berdampak dalam industri serta membuat kesan buruk di pasar uang. Stabilitas nilai tukar rupiah yang kacau, memicu tindakan *rush money* oleh para nasabah karena turunnya kepercayaan depositan terhadap sistem perbankan.

(Data 1)

Jika *rush* terjadi, **semua nasabah berbongdong-bondong menarik tabungannya. Bank Semesta pasti kolaps.** Bahkan jika seluruh aset dijual dan seluruh harta Om Liem digadaikan, itu tetap tidak akan cukup. *Come on*, semua uang telah dipinjamkan ke pihak ketiga, bagaimana mungkin kau menarik uang dari mereka dengan cepat untuk mengembalikan tabungan nasabah? (NPB/PE/RM/H40-41)

(Data 2)

Minggu, pukul dua dini hari. Waktuku tinggal 30 jam lagi sebelum pukul 08.00 hari Senin besok, ketika hari pertama Bank Semesta buka di tengah berbagai kemungkinan yang terjadi: **bank itu ditutup, *rush* besar-besaran terjadi, antrian panjang di setiap cabang, nasabah yang panik, dan boleh jadi ditambah dengan kepanikan nasabah bank lain.** Atau kemungkinan kedua, bank itu diselamatkan, pemerintah memberikan dana talangan, memberikan jaminan bahwa seluruh uang nasabah aman. (NPB/PE/RM/H193)

Data (1) menunjukkan perwujudan bentuk *rush money* ditandai dengan antrian panjang oleh nasabah di setiap cabang bank untuk mengambil uang secara tunai. Terlebih, jika pelaku *rush* berasal dari orang-orang terpendang atau pemilik tabungan berlimpah. Pengelolaan aset dengan cara matang dan ketepatan implementasi dapat menjadi cara baik dalam pengelolaan uang. Data (2) merepresentasikan kepanikan dan keresahan tidak hanya dialami oleh nasabah yang menitipkan uangnya di bank yang hampir bangkrut, tetapi juga berdampak pada nasabah di bank lain. Hal tersebut didasari rasa ketidakpercayaan nasabah terhadap sistem bank dan terlalu lama menunggu keputusan dan kebijakan dari pemerintah.

Uang nasabah yang diputar ke pihak ketiga tidak dapat ditarik secara cepat oleh bank. Jika bank hendak mengembalikan uang nasabah dengan jalan menjual seluruh aset kepemilikan, hasilnya juga tidak akan cukup untuk memenuhi *rush* yang diinginkan para nasabah. Menurut Nufus, dkk. (2019), *rush money* menyebabkan risiko kekurangan likuiditas terjadi sebab penarikan dana dalam jumlah besar secara serentak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bank.

Selayaknya sebuah perusahaan lainnya, bank juga mengalami masa jaya dan krisis. Akan tetapi, pemberitaan yang tidak tepat mengenai krisis bank dapat berdampak negatif seperti dalam kasus bank Bukopin KCP Cianjur. Pihak bank memaparkan bahwa pada dasarnya bank tidak mengalami krisis. Hanya saja, berita disebarkan tidak pada waktunya. Hal lain yang memengaruhi adalah berita tersebut datang dari kata-kata orang terpendang dan juga dibumbui oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga masalah terlihat semakin menjadi besar. Munculnya pihak-pihak di luar organisasi dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi karena menebarkan desas-desus turut berpartisipasi dalam kegagalan sebuah bank (Mulki, 2021). Dengan demikian, isu likuidasi penting untuk segera diatasi sebab termasuk permasalahan potensial yang dapat memicu ancaman bagi bank itu sendiri. Ketika isu tersebut diabaikan, maka tingkat kegagalan bank menjadi semakin tinggi.

Perwujudan bentuk *rush money* dapat mengganggu keseimbangan ekosistem bank lain sehingga kepanikan masal tidak dapat dicegah lagi. Sistem bank yang tidak stabil, kurangnya kehati-hatian, tidak menaati regulasi dengan benar, dan keserakahan dalam memutar uang nasabah juga dapat memicu kebangkrutan bank itu sendiri. Oleh karena itu, ketika bank berpotensi bangkrut, hanya ada dua pilihan tersisa yaitu menutup bank sehingga banyak nasabah kehilangan uang, aset, dan kepercayaan atau menyelamatkan bank dengan memberi nasabah jaminan bahwa uangnya aman sehingga kepercayaan kembali dan tidak menimbulkan kepanikan nasabah bank lain. Hasilnya, sistem ekonomi dapat distabilkan kembali.

Gulung tikarnya sebuah bank memang membawa kecemasan untuk masyarakat seperti yang dilansir oleh detik finance tentang tutupnya bank di Amerika bernama Silicon Valley Bank dan Signature Bank. Penutupan bank-bank ini mengkhawatirkan banyak orang di seluruh dunia. Hal tersebut dikarenakan adanya kemungkinan kedua bank tersebut meminjam uang dari bank lain untuk membayar deposannya (Brilian, 2023). Silicon Valley merupakan bank komersial terkemuka milik Amerika Serikat yang bergerak dalam pelayanan industri teknologi, ekuitas swasta, dan bahkan sebagian besar kehidupan masyarakat bergantung padanya. Bank tersebut diduga memiliki kebrokohan dalam regulasi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank runtuh. Masyarakat mulai menarik uang tunai mereka sehingga kondisi bank semakin buruk dan tidak terkendali. Kekhawatiran sistem perbankan semakin meluas ke setiap lapisan masyarakat.

(Data 3)

"Dalam beberapa jam ke depan, eskalasi kasus Bank Semesta akan bertambah besar. **Ketika seluruh media ribut mencemaskan dampak sistemis, isu *rush*, kepanikan, hanya soal waktu komite stabilitas sistem keuangan akan mengundang pihak berkepentingan rapat membahas Bank Semesta.** Untuk menghadiri rapat itu, petinggi bank sentral akan membutuhkan data terakhir tentang Bank Semesta, angka-angka, informasi, perhitungan, semuanya." (NPB/PE/RM/H158)

Dari data (3) secara jelas diketahui bahwa sebelum situasi semakin memburuk, pemerintah harus segera membantu mengatasi masalah dengan berbagai macam kebijakan yang diambil. Maka, perlu dilakukan rapat bersama pihak-pihak berkepentingan guna membahas nasib bank berdasarkan data dan informasi lengkap untuk memperhitungkan kebijakan yang diambil. Keakuratan data mempengaruhi kualitas kebijakan yang akan diambil. Semakin akurat data yang diterima, semakin bijak keputusan yang akan diambil.

Cara-cara yang dapat dilakukan dan diantisipasi ketika *rush money* semakin menyebar kepada para nasabah menurut Nasution dan Arnita (2023) yaitu: (1) membatasi penarikan tunai dalam satu waktu, (2) *campaign public relation* atau aktivitas *public relations* yang terencana untuk meyakinkan nasabah, (3) menunda penarikan secara sekaligus, (4) meningkatkan ketersediaan uang tunai tambahan, (5) meminjamkan uang tunai kepada bank lain atau bank central, (6) menjaga manajemen kredit yang baik, serta (7) melakukan perhitungan untuk menyiapkan dana nasabah yang berpotensi melakukan *rush*.

### **Shadow Economy**

Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi biasa disebut dengan *white collar crime*. Rachman memaparkan bahwa uang milyaran hingga triliunan rupiah milik negara dicuri oleh para koruptor yang seharusnya dipergunakan untuk bantuan sarana pendidikan, dana kesehatan, dan memperluas lapangan pekerjaan. Para koruptor menyimpan uang kejahatannya dengan cara pencucian uang (*money laundring*) melalui berbagai lembaga keuangan agar tidak dapat dilacak oleh aparat keamanan. Tujuannya agar uang tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu panjang untuk membeli aset ataupun kebutuhan sehari-hari (Manihuruk dkk., 2020). Bentuk *shadow economy* dapat dilihat dalam data berikut.

Data (4)

"Uang kotor dari pembalakan hutan misalnya. **Kau tidak bisa membayangkan, ke mana saja triliunan uang dari penebangan hutan di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, bahkan Papua dicuci bersih dalam sistem keuangan kita.** Jumlahnya tidak terbayangkan, karena bahkan uang suapnya untuk perwira tinggi polisi, pejabat setempat, orang-orang berkuasa saja bisa puluhan miliar. Kami setidaknya memiliki belasan rekening milik mereka. (NPB/PE/SE/H142-143)

Data (5)

"Kau tahu, dari seribu triliun anggaran negara, menurut ekonom senior, hampir dua puluh persen dikorup dan disalahgunakan. Siapa yang menampung uang itu? Perbankan nasional! **Uang suap, sogok, pelicin, bahkan uang pajak yang tidak**

**masuk ke kas negara, puluhan triliun nilainya. Ke mana uang itu berlabuh? Perbankan nasional!** Kebanyakan orang hanya melihat *money laundering* dari kegiatan mafia, kejahatan bersenjata. Padahal di luar itu banyak sekali kasusnya. Kami membuka rekening untuk petugas korup, pejabat negara jahat, membuat rekening giro perusahaan fiktif, semua yang mungkin dilakukan. Aku tidak tahu detailnya, kepala cabang dan pemimpin Bank Semesta yang lebih tahu.” (NPB/PE/SE/H143)

Data (4) digambarkan bahwa kegiatan pembalakan hutan dapat menghasilkan uang yang sangat banyak. Akan tetapi, triliunan uang dari hasil pembalakan hilang melalui ekonomi gelap para pekerjanya. Uang tersebut seakan-akan tidak pernah ada sehingga tidak dapat diprediksi oleh PDB (Produk Domestik Bruto). Pada data (5) dijelaskan triliunan anggaran negara melewati aktivitas ekonomi gelap sehingga menyebabkan kerugian besar dan berpotensi menambah angka SUN (Surat Utang Negara). Anggaran negara yang seharusnya digunakan beroperasi untuk kesejahteraan rakyat, berputar menjadi keuntungan pribadi pelaku korupsi. Hal yang lebih berbahaya adalah uang hasil pencucian seperti sogokan, suapan, pelicin, dan bahkan pajak yang tidak masuk ke kas negara dapat disamarkan menjadi uang halal dengan berbagai rekayasa ekonomi gelap sistem perbankan. Tujuannya untuk menyamarkan asal usul uang kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sedemikian rupa sehingga seolah-olah uang kekayaan tersebut berasal dari kegiatan halal.

*Money laundering* memiliki pengaruh negatif terhadap sistem keuangan nasional maupun internasional. Menurut Manihuruk dkk. (2020), *money laundering* menyangkut efektifitas penggunaan sumber dana dan daya yang dipergunakan. Dengan demikian, penetapan hukum pidana terhadap pelaku *money laundering* harus ketat dilakukan meskipun sulit dalam mengidentifikasi aset-aset kepemilikan yang susah dideteksi sebab telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Tindakan memberantas korupsi tidak hanya berhenti dalam menghukum pelaku *money laundering*, tetapi juga menyita hasil tindakan pidana sehingga dapat diinvestasikan kembali kepada negara.

Dewasa ini, rekayasa keuangan menjadi hal lumrah saja sehingga jika tidak diarahkan dengan benar hanya akan membuka peluang untuk korupsi. Sedangkan korupsi sendiri sangat merugikan stabilitas ekonomi negara. Dengan demikian, perlu adanya pendidikan antikorupsi sejak dini. Menurut Ariatmi, dkk. (dalam Nugraha, 2020), pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan Indonesia sudah dibuat oleh pemerintah pada tahun 2004 berdasarkan Instruksi Presiden No. 5/2004 yang mana memiliki tujuan dalam mengupayakan adanya doktrinasi pemerintah melalui ruang kelas untuk menanamkan sikap dan perilaku antikorupsi pada warga negara. Akan tetapi, bisnis hitam ternyata dapat direkayasa menjadi bisnis putih seperti ditemukan dalam data berikut.

Data (6)

Kekuasaannya mencengkeram benua Amerika Utara, Australia, dan sebagian Afrika. Dia tidak menutup kehidupannya dari dunia. Sejak lama keluarga J.J. Costello berhasil **melebur bisnis hitam mereka lewat entitas legal dan resmi**. Penduduk Amerika bahkan mengenalnya sebagai dermawan, filantropis, pemilik kerajaan bisnis terbesar di sana. Tapi di belakang layar, dia lebih dari itu. Melampaui catatan mafia, penguasa *black market*, dan semua ekonomi bawah tanah yang pernah ada di sana. Bahkan setiap Presiden Amerika Serikat terpilih,

sebelum dilantik diam-diam datang mencium tangannya, meminta restu. (BDUT/PE/SE/H245)

Data (7)

"Kau tahu, **tidak semua orang bisa memperoleh seratus kilogram bubuk heroin, Thomas, juga sekarung senapan, granat, dan peledak. Itu semua hanya bisa dibeli di pasar gelap.** Kalaupun kau punya uang banyak, tidak mudah membeli seratus kilogram heroin. Membawanya ke mana-mana lebih sulit lagi. Itu tidak sama dengan membawa satu kuintal gandum. Kau jelas sedang berurusan dengan mafia, Thomas. Atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan dunia hitam tersebut." (NDUT/PE/SE/H99-100)

Data (6) merepresentasikan bisnis hitam atau kerap disebut sebagai bisnis ilegal, melalui berbagai rekayasa dapat melebur menjadi bisnis legal dan resmi. Bahkan, perubahan tersebut tidak diketahui masyarakat luas. Peleburan bisnis yang tidak dapat dilakukan oleh semua mafia, menjadi tanda bahwa pemilik bisnis tersebut lebih menguasai rekayasa dan bisnis pasar hitam. Data (7) mengukuhkan data (6) bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan dengan mudah barang-barang ilegal, kecuali memiliki relasi dan pengaruh di dalam pasar gelap. Sulitnya menghitung luas skala kegiatan yang terlibat dalam aktivitas *shadow economy* menjadi penyebab kesukaran mendeteksi sejak dini. Selain barang haram ganja, kegiatan yang termasuk *shadow economy* juga dapat berupa transaksi uang kotor yang tidak dapat dideteksi oleh PDB (Produk Domestik Bruto).

Prevalensi dalam catatan penggunaan narkoba di negara Indonesia mencapai 2% pada tahun 2015 atau lebih dari 4 juta jiwa. Artinya, penyalahgunaan narkoba di Indonesia dalam kategori sangat mengkhawatirkan sehingga jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah maupun masyarakat, jelas akan terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Padahal, dampak negatif penggunaan narkoba telah nyata menghancurkan tatanan hidup bangsa dan negara (Subandri, dkk., 2021). Meskipun peredaran narkoba sudah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, namun kesadaran masyarakat tentang bahaya yang akan diterima msaih tergolong rendah. Oleh karena itu, peran BNN dalam memberantas peredaran gelap narkoba sangat diharapkan.

### ***Inflasi***

Secara umum, inflasi memicu dampak negatif terhadap sistem ekonomi sebuah negara. Terlebih, jika inflasi yang terjadi di atas sepuluh persen. Faktanya, inflasi ringan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Alasannya, inflasi memberi semangat kepada para pengusaha untuk meningkatkan jumlah produksinya. Hasilnya, para pengusaha bersemangat dalam memproduksi barang dan memperluas jaringan dengan alasan mendapat banyak keuntungan. Peningkatan produksi juga memberi nilai positif dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru (Simanungkalit, 2020). Data yang menggambarkan inflasi dapat dilihat dalam kutipan berikut.

Data (8)

Karena mereka diamanahkan oleh undang-undang untuk menjaga stabilitas perekonomian. **Stabilitas itu salah satunya tecermin dari angka inflasi. Misalnya, ketika harga-harga diperkirakan naik, perekonomian tumbuh terlalu cepat, overheating, bank sentral mengantisipasinya dengan ikut menaikkan suku bunga SBI.** Naiknya suku bunga, secara teoretis akan membuat orang yang punya banyak uang memilih menabung dibandingkan

belanja. Akibatnya, uang beredar berkurang, aktivitas jual-beli menurun, harga-harga jadi turun. Juga sebaliknya, ketika harga-harga diperkirakan terlalu turun, perekonomian melambat, bank sentral akan mengantisipasinya dengan menurunkan SBI. Turunnya suku bunga SBI otomatis akan membuat suku bunga pinjaman bank turun, dana murah, orang-orang berbondong pinjam uang, aktivitas jual-beli naik, perekonomian kembali bergairah. (NPB/PE/INF/H61)

Data (9)

Inilah ajaibnya ilmu ekonomi, **inflasi adalah fungsi dari ekspektasi (perkiraan, persepsi)**. Berapa tingkat inflasi tahun depan? 8 persen? 10 persen? Semua hasil dari perkiraan, antisipasi. Berapa inflasi bulan depan? 0,5 persen? 1 persen? Semua keluar dari kalkulasi perkiraan, eskpektasi. (NPB/PE/INF/H61-62)

Data (8) merefleksikan inflasi sebagai penyebab ketimpangan stabilitas ekonomi. Ketika inflasi terjadi, harga-harga naik, uang beredar semakin banyak, laju ekonomi terlalu tinggi, pemerintah dapat menaikkan suku bunga SBI agar orang kaya tertarik untuk menabung dari pada berbelanja, begitu juga sebaliknya. Data (9) menunjukkan inflasi sebagai ekspektasi dari para pakar ekonomi untuk menjaga kestabilan. Semua data yang dihasilkan dari perkiraan-perkiraan berdasarkan rumus yang disepakati bersama, meskipun pada kenyataannya hasil yang diperoleh memiliki dua kemungkinan yaitu benar atau salah. Pergerakan presentase inflasi menurut Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Tingkat Inflasi di Indonesia Pertahun**

<b>Tahun</b>	<b>Presentase</b>
2023-Mei	1,10
2022	5,51
2021	1,87
2020	1,68
2019	2,72
2018	3,13
2017	3,61
2016	3,02

Permasalahan jangka panjang sebuah negara adalah mengatur laju pertumbuhan ekonomi agar berjalan dengan cepat dan terarah. Setiap negara mempunyai kesamaan tujuan, yakni mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan output perkapita dan pendapatan negara yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu relatif lama. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi inilah yang menentukan sehat atau tidaknya perekonomian negara. Apabila sebuah negara tidak mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya, maka memicu munculnya masalah ekonomi dan sosial baru, misalnya semakin tinggi angka kemiskinan. (Fadilla dkk., 2021). Di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, inflasi mengurangi daya beli uang yang mereka miliki untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Menurunnya daya beli terhadap uang yang dimiliki, sehingga pendapatan riil seseorang turun saat inflasi meningkat. Variabel inflasi sangat signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Temuan ini dikuatkan oleh teori bahwa

inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi sehingga menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa. Pertumbuhan tersebut menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berujung pada peningkatan jumlah penduduk miskin (Ningsih dan Andiny, 2018). Dengan demikian, angka inflasi berbanding lurus dengan angka pengangguran atau penduduk miskin.

### ***Pasar Non-Riil***

Salah satu cara berbisnis adalah investasi. Investasi menurut Finthariasari, dkk. (2020), yakni menanam dana atau aset kepada sebuah perusahaan demi memperoleh imbal balik lebih besar daripada yang diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu. Bentuk investasi bermacam-macam mulai dari investasi emas, properti, saham, reksadana, deposito bank, hingga mata uang asing (forex). Investasi biasanya terjadi dalam pasar modal (capital market) karena instrumen keuangannya berjangka panjang, berjangka lebih dari satu tahun, dan dapat dijual belikan. Termasuk di dalamnya saham (ekuiti), reksadana, obligasi (surat utang), serta instrumen derivatif lainnya seperti *futures*, *option*, dan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam data berikut.

Data (10)

"Bukan karena dia tidak bisa dilihat, **tentu saja muasal kekacauan pasar modal dan pasar uang kita amat terlihat, tidak susah mengurai benang kusutnya**. Kita tidak bisa menemukannya, karena kalau itu dilakukan, kita semua di sinilah yang pertama kali tertikam. Kitalah yang terlalu serakah dan kreatif menciptakan pola transaksi keuangan, membiarkan bahkan membuat nilai aset menggelembung tidak terkendali, mengabaikan risiko sebesar Gunung Everest di depan hidung. Peduli setan? **Sepanjang bonus tahunan terus membubung dan semua fasilitas pesawat jet perusahaan, hotel terbaik, liburan berkelas tetap ada. Temuan audit pun dibungkus sebaik mungkin**. Peringatan awal dianggap angin lalu. Mulailah kita terbiasa mematuhi informasi, memabrikan kemasan, **melupakan bahwa itu semua ada batasnya. Ketika nilai surat berharga semakin lama semakin menggelembung, harga selebar kertas bisa setara berkilo-kilo emas, padahal sejatinya dia tetap selebar kertas**." (NPB/PE/PNR/H14-15)

Pada data (10) diketahui kekacauan yang diakibatkan pasar modal dan pasar uang disebabkan oleh pihak-pihak kapitalis yang sangat rakus. Mereka mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan resiko besar di depan mata. Sepanjang bonus tahunan lancar, fasilitas transportasi bergengsi, hotel berkelas, dan liburan terbaik tetap ada, peringatan tentang kekacauan pasar *non-riil* akan dilupakan. Mereka senantiasa rakus menambah jumlah kekayaan hingga lupa batas.

Pada dasarnya, menurut Triono (dalam Setiawan, 2019) bunga mendorong investor untuk menyimpan uangnya di bank. Mulanya, penciptaan bank bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dari uang-uang yang diterima dari masyarakat. Memperkecil distribusi uang di sektor riil dan memperbesar di sektor non-riil. Pasar modal berperan memperjual belikan obligasi sebagai media pelarian ketika suku bunga di perbankan rendah. Begitu juga ketika suku bunga di pasar modal rendah, masyarakat berbondong-bondong memindah investasi ke perbankan. Akhirnya, timbullah penggelembungan dana di sektor non-riil bebarengan dengan munculnya jual beli surat berharga untuk meraih keuntungan dalam waktu singkat. Hal tersebut dapat dicermati dalam data-data berikut.

Data (11)

Dengan uang hasil **menjual seribu surat perjanjian kredit**, bank leluasa mengucurkan kredit berikutnya ke penduduk kota. Bank menerima pembayaran dari nasabah setiap bulan. **Uang itu dipergunakan untuk membayar pemegang aset *securitization***. Semua terkontrol, semua baik-baik saja, hingga **tanpa disadari aset yang pada dasarnya hanyalah selembur kertas itu menggelembung tidak terkira**. (NPB/PE/PNR/H22)

Data (12)

**"Harga properti melesat naik, harga komoditas tidak terkendali**. Karena juga bermunculan derivatif transaksi keuangan lainnya, Mister Smith menciptakan **transaksi *future*: minyak bumi atau gandum yang dibutuhkan enam bulan lagi bisa dibeli sekarang, lantas uangnya bisa diputar ke mana-mana**, menjadi berkali lipat. Dan boom! **Ribuan kredit perumahan tiba-tiba macet total**, orang mulai berpikir harga-harga sudah tidak rasional. Harga komoditas jatuh bagai *roller coaster*, dan mulailah kekacauan merambat ke mana-mana. (NPB/PE/PNR/H22)

Data (13)

Karena itu, mereka ciptakanlah berbagai produk keuangan untuk menampungnya. Tidak puas mendapatkan lima persen bunga bank, **mereka menyerbu ke obligasi dan saham**. Tidak puas juga, mereka menyerbu ke **komoditas dan transaksi derivatif yang semakin rumit**. (NPB/PE/PNR/H23)

Data (11) menunjukkan ancaman pasar non-*rill* dari segi surat perjanjian kredit (*securitization*). Hal ini kita kenal dengan kontrak utang yang dapat memberikan efek sehingga dapat diperjual belikan. Pada data (12) dijelaskan munculnya transaksi keuangan baru ketika transaksi lama dirasa mengalami permasalahan. Lambat laun, permasalahan itu semakin menumpuk sehingga semakin rumit dan besar. Transaksi *future* sebagai jembatan dalam kepemilikan kekayaan masa depan, dapat dibeli sekarang dengan tujuan mendapatkan uang sedini mungkin agar dapat diputar ke mana-mana. Data (13) menunjukkan ketamakan para kapitalis dalam menambah properti kepemilikan dengan menyerbu berbagai bisnis. Tidak puas menyerbu bank dengan mendapatkan bunga, mereka mulai menyerbu saham, obligasi, komoditas, hingga menciptakan transaksi derivatif yang pasti semakin rumit.

Setiap perusahaan keuangan harus menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Candra (2021), di dunia perbankan, diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Badan Usaha Syariah. Dinyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah cara pengelolaan bank yang mengikuti prinsip-prinsip independensi, transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, dan kewajaran. Semua aturan tata kelola Bank Indonesia merupakan peraturan yang wajib berlaku bagi setiap bank, utamanya sejak lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011, yang mempunyai tupoksi hukum atas industri jasa keuangan di Indonesia. Beberapa kasus penyimpangan GCG perusahaan keuangan di Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2**  
**Kasus Pelanggaran GCG di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Jenis Pelanggaran GCG</b>
2018	BJB Syariah	Kredit Fiktif
2018	Bank Syariah Mandiri	Penipuan Pembiayaan Rumah
2019	BTPN Syariah	Penggelapan Dana Nasabah
2020	BNI Syariah	Hilangnya Uang Nasabah
2020	BRI Syariah	Investasi Bodong
2021	Bank Jateng Cabang Blora	Rekayasa Kredit KPR dan Proyek Non-APBD
2021	PT Djaya Abadi Soraya	Kredit Fiktif

Data (14)

Nasabah jenis ini seharusnya tahu persis dana mereka adalah produk investasi, dan persis seperti kalian **berinvestasi atas sesuatu, risiko kehilangan selalu ada**. Seharusnya Om Liem dan stafnya menjelaskan masalah ini saat nasabah tersebut menyetor uang, tapi apapula yang diharapkan? Om Liem sendiri, dengan ambisi besarnya, boleh jadi yang **memerintahkan menutupi banyak informasi**. (NPB/PE/PNR/H323)

Data (14) menggambarkan resiko kehilangan sudah pasti ada. Kurangnya informasi penting dari perusahaan terkait, dapat memicu kerugian sehingga tidak mendapatkan profit atas investasi. Oleh sebab itu, selain menanam modal, investor perlu menganalisis data ekonomi dan melihat neraca keuangan dengan detail guna mengetahui perjalanan arus keuangan perusahaan tersebut. Bahkan, ketika hendak membeli saham dari perusahaan milik pemerintah, investor harus tetap berhati-hati karena banyak kepentingan politik terlibat di dalamnya.

Apapun jenis investasi yang dilakukan pasti memiliki risiko. Menurut Rahmany (2019), investor harus senantiasa memperkirakan arus pendapatan atau *cashflow* yang hendak diterima selama investasi. Terkadang, estimasi penerimaan tidak sesuai dengan perkiraan awal. Ketika faktor-faktor tertentu dapat diprediksi, itu disebut risiko. Namun, ketika kondisi yang akan terjadi tidak dapat diprediksi, disebut ketidakpastian. Dalam beberapa kasus, investasi yang hilang sebagian besar disebabkan oleh analisis risiko yang tidak sesuai dengan analisis atau perhitungan risiko yang kurang matang.

### **Bentuk Patologi Politik**

Patologi politik menurut Putra (2014), merupakan gejala sosial yang dianggap sakit sehingga mengganggu sistem politik dan turut menyebabkan munculnya patologi birokrasi, yaitu gangguan (abnormalitas) sistem birokrasi. Pelaksanaan otonomi daerah menyampaikan pemahaman bahwa keterlibatan birokrasi daerah dalam pembentukan kerja sama politik daerah (parpol dan elite daerah) baik mencakup etika politik dan etika jabatan pada dasarnya tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sehingga memicu munculnya patologi politik. Birokrat yang mengatur sistem pemerintah yang seharusnya netral terseret ke wilayah yang mengungungkan kemandirian birokrasi daerah. Pengertian patologi politik dalam hal ini memiliki arti kausalitas serta kesinambungan. Artinya, patologi politik akhirnya mengarah pada patologi birokrasi.

Politik memiliki berbagai patologi sebelum melahirkan masalah politik. Sering kali efek yang tidak diinginkan muncul ketika ada penurunan demokrasi melalui berita palsu, disinformasi, dan manipulasi. Fossum (2022) memperkenalkan beberapa macam tingkatan patologi politik melalui berjalannya demokrasi, yaitu: (tingkat satu) memfungsikan demokrasi dengan korektif yang mapan; (tingkat II) memfungsikan demokrasi meskipun dengan koreksi yang tidak memadai; (tingkat III) demokrasi formal tanpa tindakan korektif (illiberal demokrasi); dan (tingkat IV) rezim otoriter. Sejalan dengan itu, Ritaudin (2012) kesalahan dasar politisi dalam pekerjaan mereka adalah menetapkan kebijakan sebagai tujuan untuk kemudian mencapai tujuan tersebut pasti membenarkan segala cara. Memahami politik sebagai kekuasaan, kekuasaan berarti uang, akhirnya menjadikan politik sebagai gaya hidup yang harus dilalui. Oleh karena itu, dapat diklasifikasikan bentuk-bentuk patologi politik menjadi tiga macam yaitu (1) *transactional politics*, (2) *abuse of power*, dan (3) *conflict of interest*.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa patologi politik memiliki beberapa bentuk. Berbagai macam bentuk patologi politik saling terkait antara satu dengan lainnya. Politik ibarat rawa-rawa yang mana dapat membuat setiap orang yang memasukinya menjadi kotor. Bentuk-bentuk patologi politik yang ditemukan dalam penelitian ini yakni (1) transaksi politik, (2) penyalahgunaan kekuasaan, (3) konflik kepentingan, serta (4) manipulasi dan kamufase.

### **Transaksi Politik**

Transaksi politik biasa disebut dengan politik uang atas fenomena dalam sistem politik. Dunia politik tidak hanya berkisar dalam kasus pemilu, melainkan juga cara berbisnis, pengelolaan objektivitas berita, serta cara berkehidupan sehari-hari. Menurut Basri (2020), di Indonesia, demokrasi politik masih belum matang sehingga uang digunakan untuk mobilisasi keberpihakan dan dukungan. Dengan demikian, politik bergeser fungsi yang semula digunakan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat menjadi ladang bisnis pribadi. Bentuk transaksi politik dalam pengelolaan berita dapat dilihat dalam data berikut.

Data (15)

"Kiriman empat tiket konser minggu depan untuk Shambazy. **Siapa nama artis yang mau konser itu? Anak-anak remaja Shambazy pasti suka. Kau juga kirimkan surat rekomendasi untuk wartawan televisi yang ikut pertemuan tadi, kalau tidak salah dia mendaftar *short course*.** Tidak akan ada sekolah bisnis yang menolak rekomendasiku. Juga untuk salah satu pengamat ekonomi, kau berikan undangan forum ekonomi internasional di Bangkok bulan depan. Sampaikan bahwa dia jauh lebih layak dibanding Thomas, kita akan membayar biaya perjalanannya. **Juga kau hubungi kampus tempat pengamat ekonomi lainnya bekerja, kita akan menawarkan sponsor riset.** Sudah kau catat? Dan kau cari tahu **hadiah apa yang tepat untuk wartawan dan editor lain.**" (NPB/PP/TP/H93)

Data (16)

Tidak terbilang kerugian. **Belum lagi uang yang dihabiskan untuk menyumpal petugas, jaksa penuntut terkait kasus-kasus baru yang muncul susul-menyusul. Sengketa lahan gudang (entah kenapa tiba-tiba ada akta tanah kembar), penjelasan atas sekurung benda haram (ganja) di gudang kami.** Semua kejadian sial itu membuat bisnis keluarga tersumbat. (NPB/PP/TP/H112)

Data (15) merepresentasikan transaksi politik yang diinginkan oleh tokoh Thomas kepada para pengamat ekonomi dan wartawan dengan memberikan hadiah-hadiah. Di tengah-tengah serangan politik yang semakin panas, Thomas mencoba bekerja sama dengan teman-teman penggerak media massa untuk membentuk opini publik. Melalui hadiah-hadiah yang tidak mudah didapat tersebut, tokoh Thomas menamkan ide dengan cara berkelas kepada para pengamat ekonomi dan wartawan agar berpihak kepadanya. Data (16) menggambarkan korupsi yang dilakukan petugas pemerintahan atas kasus-kasus yang diterimanya. Transaksi politik berupa uang suap tidak dibenarkan di negara manapun. Uang suap yang diberikan kepada petugas pemerintah sebagai bentuk transaksi politik atas perjanjian antara dua pihak yang saling membutuhkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Dari data (15) sudah jelas bahwa media massa digunakan untuk membentuk opini publik agar berpihak pada tokoh Thomas. Menurut Salsabila dan Kusumastuti (2021), idealisme media menunjukkan dua ciri dalam menjalankan tugas yang selaras dengan misinya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pers mendapat julukan sebagai pilar keempat dari jajaran sistem demokrasi dewasa ini, yakni media massa. Hal tersebut karena media sosial diposisikan sebagai pengontrol dan dapat dapat memberi pengaruh dan mengendalikan opini publik. Oleh karena itu, media tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan hiburan dan informasi saja. Namun, media juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai pengawas dan pengontrol. Pesatnya perkembangan media massa yang mampu menembus ruang dan waktu dimanfaatkan dengan baik oleh para penguasa dalam membentuk opini publik berdasarkan realitas dan kepentingannya sendiri sehingga merubah fungsi media menjadi sarana komunikasi politik.

Data (16) mengukuhkan uraian data (15) bahwa transaksi politik terjadi di seluruh tatanan instansi baik yang bersifat pemerintahan maupun swasta. Transaksi politik dewasa ini tidak hanya berkisar tentang uang, tetapi juga tawaran-tawaran lainnya yang tidak kalah menggiurkan daripada uang. Menurut Liata (2020), tidak dapat dipungkiri bahwa elite politik dan masyarakat sebagai basis suara saling mempengaruhi. Elit politik membutuhkan dukungan suara, sebagaimana masyarakat membutuhkan saluran perjuangan politik untuk meningkatkan kekayaannya. Situasi ini kemudian menciptakan hubungan simbiosis timbal balik yang saling menguntungkan dalam politik. Elit partai politik memberikan hal-hal tertentu baik sifatnya material atau non-material kepada masyarakat dengan basis pemilihan yang mereka bentuk, dan mendapat manfaat dari masyarakat tersebut. Pada saat yang sama, masyarakat mendukung elit partai politik dalam bentuk materi maupun non-materi dan menerima imbal balik, baik berupa fisik maupun nonfisik. Hubungan mutualisme juga dapat dilihat dalam data berikut.

Data (17)

Lumrah saja, **itu barter, mereka melindungi Bank Semesta dan grup bisnis kami dalam setiap kasus. Kami melindungi kerahasiaan data dan transaksi keuangan mereka** dari intipan banyak orang. (NPB/PP/TP/H143)

Data (18)

"Ayo, Thom. Katakan saja, **apa yang bisa kauberikan untuk partai kami. Nah, nanti kita lihat apa yang bisa kami berikan sebagai imbalannya.**" Dia balas menatapku tersenyum. (NPB/PP/TP/H381)

Data (19)

"Besok siang, jika keputusan komite adalah menyelamatkan Bank Semesta, **seperti janjiku, aku akan membayar lunas semua bantuanmu, lengkap**

**dengan bunga-bunganya.** Itu janji petarung, kau tahu persis nilainya. Posisi, martabat, kariermu sebagai polisi akan pulih.” Aku menepuk lengan Rudi penuh penghargaan. (NPB/PP/TP/H395)

Data (17) merepresentasikan pengaruh politik bisnis melancarkan budaya korupsi. Keuntungan transaksi yang dirasakan kedua belah pihak adalah keamanan operasi perusahaan dan perlindungan kerahasiaan data transaksi keuangan haram. Dalam berpolitik, suatu kelompok atau seseorang akan mencari mitra untuk membuka jalan. Kelompok berkepentingan mencari mitra yang cocok untuk memulukan keinginan dan kepentingannya. Data (18) menunjukkan bahwa tiada proses politik tanpa transaksi. Politik transaksional berakar pada partai politik yang berjenjang dan tidak solid, termasuk dalam kaderisasi. Politik menjadi tidak lebih dari sebuah bisnis dengan logika modal yang dikeluarkan harus kembali atau setidaknya menguntungkan. Hal tersebut mengakibatkan praktik politik menghasilkan pemimpin yang melayani kepentingan kelompok tertentu, bukan rakyat. Data (19) menggambarkan transaksi politik antar pihak berkepentingan sehingga kebijakan dapat saling diperjual belikan. Dalam dunia politik, puncak keberhasilan dapat diukur melalui kemampuan memperoleh kekuasaan dan mengakses sumber keuangan yang memungkinkan untuk kelompoknya. Akibatnya, fenomena tersebut melahirkan kasus korupsi.

Model hubungan sosiologi politik selalu mempertimbangan untung rugi. Menurut Liata (2020), model hubungan yang terjalin mengacu pada kepentingan antar partai politik atau antara partai politik dan kepentingan masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari sistem upah atau hadiah (*reward*). Fenomena ini tidak dapat dihindari, terlebih dalam tipe masyarakat materialistis dewasa ini, sehingga tindakan dan perilaku didasarkan oleh pertimbangan ekonomi dan kenyamanan psikologis. Lebih luas lagi, George C. Homans mengatakan bahwa tidak hanya uang yang dipertukarkan, tetapi juga barang-barang lain seperti penerimaan sosial, kehendak, harga diri, cinta, perasaan, dan lainnya yang sifatnya tidak materialistis. Bahkan, kegiatan keagamaan dan budaya juga dapat ditukar dengan manfaat yang dikemas secara menarik.

### ***Penyalahgunaan Kekuasaan***

Penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* merupakan perbuatan menyalahi hukum karena menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Penyalahgunaan kekuasaan berarti eksploitasi dalam jabatan. Kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintah tidak boleh disalahgunakan karena bentuk amanah yang diberikan oleh rakyat. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan dapat dilihat dalam data berikut.

Data (20)

”Omong kosong! Kau pernah melakukannya, belasan kali boleh jadi. **Sudah berapa banyak buronan yang kalian loloskan ke luar negeri**, hah? Bukankah dengan mudah kalian bisa mengarang-ngarang alasan?” (NPB/PP/PK/H57)

Data (21)

”Juga surat-menyurat perusahaan, gudang-gudang, kapal. Biarkan kami yang pegang, dengan itu akan terlihat iktikad baik keluarga kalian menyelesaikan masalah. **Aku bisa membujuk jaksa kepala untuk membatalkan tuntutan. Menghilangkan bukti-bukti,**” Tunga ikut berkata bijak. (NPB/PP/PK/H116)

Data (20) mempresentasikan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat tinggi di kantor imigrasi. Petugas tersebut meloloskan banyak buronan kelas kakap ke luar negeri guna mengais keuntungan pribadi. Melepaskan buronan ke luar negeri melalui kekuasaan penjaga gerbang imigrasi sangat menyalahi hukum yang berlaku. Data (21) mengukuhkan bahwa hal serupa juga dilakukan oleh petugas pemerintah lainnya yang memiliki kedudukan tinggi sehingga dapat berbuat semaunya sebab kekuasaan yang tidak terbatas. Letnan polisi dan pejabat kejaksaan bekerja sama untuk mendapatkan surat meyurat perusahaan, gudang-gudang, dan kapal milik klien guna keuntungan pribadi. Melalui kekuatan kekuasaan yang dimiliki, kedua pejabat tersebut merayu guna mendapatkan apa yang mereka mau berembel-embel menyelesaikan masalah klien dengan membujuk jaksa. Selain itu, mereka akan menghilangkan bukti-bukti kasus yang dimiliki oleh klien.

Banyaknya penyalahgunaan kekuasaan berbanding lurus dengan jumlah kasus korupsi. Kasus ini sudah mewabah tidak hanya di wilayah Jawa, bahkan daerah Aceh juga memiliki banyak kasus. Menurut Juliana dan Iqbal (2017: 116), berdasarkan data Bidpropam Polda Aceh tahun 2011-2015 tentang himpunan pelanggaran yang dikumpulkan seluruh jajaran Polres di daerah hukum Polda Aceh, diketahui bahwa penyidik yang melanggar UU Kepolisian Aceh sejumlah 72 (tujuh puluh dua) kasus. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan terbanyak yang dilaporkan adalah korupsi dalam bentuk suap, yaitu menerima suap sebagai hadiah dari pihak yang terlibat hukum.

Kasus pelanggaran jabatan lainnya juga banyak yang menghebohkan publik. Contohnya seperti kasus penahanan dan pencopotan jabatan Brigjen Pol Prasetyo selaku Kepala Kantor Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai polisi kriminal (Bareskrim). Kasus ini terjadi sebab pelaku memberikan izin operasional kepada Djoko Tjandra, seorang tersangka korupsi sebagai buronan kelas kakap (Maya, 2021: 991). Penyalahgunaan kekuasaan muncul karena iming-iming imbalan yang besar.

Upaya pembatasan kekuasaan dalam negara menurut Asshiddiqie (dalam Khaerunnaila, dkk., 2019), terbagi menjadi dua cara yakni vertikal dan horisontal. Pembatasan pemakaian kekuasaan dilakukan dengan cara pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga kecil milik negara yang bersifat *check and balance*, sehingga mampu saling menyeimbangi dan memeriksa. Oleh sebab itu, kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu ruang institusi dan berpeluang untuk adanya tindakan sewenang-wenang dari pemilik kekuasaan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dapat dilakukan oleh siapa saja yang tidak dapat memosisikan diri dengan baik. Selain dalam lingkup kepolisian dan kejaksaan, penyalahgunaan kekuasaan juga dilakukan dalam sistem perbankan. Fenomena tersebut dapat ditemukan dalam data berikut.

Data (22)

Pejabat bank sentral itu mengalah. **Dia mentah-mentah mengerjakan apa yang kausuruh, mempermanis laporan. Entah dari mana dia memperoleh angka talangan dua triliun.** Dia juga menghapus seluruh laporan rekayasa dan kejahatan keuangan Bank Semesta di seluruh laporan sebelumnya. (NPB/PP/PK/H246)

Data (22) menunjukkan bahwa lemahnya moral sehingga tidak dapat mengendalikan kekuatan kekuasaan yang tengah diemban sehingga memicu banyak penyimpangan. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat bank sentral

adalah mempermanis laporan keuangan bank bobrok yang hampir kolaps. Melalui kekuatannya, dia merekayasa kejahatan keuangan bank bobrok agar diselamatkan oleh pemerintah.

Kejahatan bank memang sering terjadi seperti kasus tahun 2021 yang dilakukan oleh salah satu cabang Bank Jateng dengan jasad bank Fraud. Bank tersebut memiliki saham kepemilikan yang beranggotakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Blora. Pelaku kejahatan bank memiliki keuntungan karena termasuk golongan kepala Satuan Kerja Daerah (SKPD) di wilayah kabupaten sehingga memiliki relasi baik dengan pimpinan daerah setempat. Modus operandi kejahatan mantan pimpinan bank berupa pemberian kredit fiktif proyek non-APBD dengan jaminan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) serta rekayasa persyaratan kredit calon debitur KPR. Kasus ini memicu kerugian negara sebanyak Rp. 115.000.000.0000,00 (Seratus Lima Belas Milyard Rupiah) dengan korban 140 (seratus Empat Puluh) korban calon debitur karena runtuhnya fasilitas kredit Bank Jateng Cabang Blora (Puspitarini dan Ratnawati, 2023). Kerugian yang ditanggung negara membuat hutang negara semakin tinggi.

Pada dasarnya, banyak sekali kasus penyalahgunaan kekuasaan yang ditemukan. Bahkan, menurut Malian (2019: 103), terungkap seorang direktur Garuda Indonesia menyelundupkan sepeda motor mewah pada 17 November 2019 silam. I Gusti Ngurah Askhara selaku direktur utama Garuda Indonesia, menyelundupkan sepeda motor Brompton dan Harley-Davidson sehingga berakhir dengan hukuman pemecatan sebagai direktur utama Garuda Indonesia. Otoritas Bea dan Cukai menemukan barang penyelundupan itu di badan pesawat Airbus A330-900 Neo Garuda GA 9721. Sri Mulyani Indrawati, menteri keuangan, memaparkan dampak penyelundupan berkisar antara Rp532 miliar hingga Rp1,5 miliar. Kasus ini memperpanjang jumlah kasus penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara. Artinya, jabatan strategis sangat rentan ditemukan penyimpangan.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan kerugian negara. Pegawai tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan benar yang berarti menyalahi cita-cita organisasi. Pada kasus bank fraud, kerugian negara disebabkan upaya pemerintah dalam menutup kerugian bank demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Baik dilakukan oleh bank milik pemerintah ataupun bank swasta. Hal tersebut secara otomatis akan memengaruhi sistem perekonomian negara.

### ***Konflik Kepentingan***

Masalah akuntabilitas maupun transparansi dalam pengelolaan sumbangan dana kampanye merupakan salah satu tolak ukur untuk menjamin kualitas sistem dan pelaksanaan politik di negara demokrasi. Hal itu dilakukan supaya para pemimpin yang telah terpilih dari partai politik tidak tersandera kepentingan pemodal kampanye (Ma'mun, 2022). Transparansi dapat digunakan sebagai pengontrol kasus-kasus konflik kepentingan dari setiap anggota partai politik sehingga pengelolaan partai dapat dilakukan dengan bersih. Partai politik merupakan media untuk mencapai cita-cita bersama masyarakat, bukan ladang bisnis pribadi seperti yang ditemukan dalam data berikut.

Data (23)

"Siapa yang sebenarnya memiliki sebuah partai politik? Karena lihatlah, bukankah ada banyak partai politik di negeri ini yang tidak ubahnya seperti perusahaan. Manajemen eksekutifnya adalah presiden direktur. Dia memenangi

kompetisi pemilihan ketua partai dengan investasi, menyempal seluruh pemilik suara, lantas seperti sudah membeli saham mayoritas, seluruh partai kemudian menjadi milik pribadinya. **Apa kata presiden direktur, semua anggota harus taat. Dia bisa memecat siapa pun yang berseberangan pendapat.** Dia bisa melakukan apa pun. Di mana letak demokrasinya jika partai politik sendiri tidak lebih dari perusahaan swasta? Dijadikan alat kepentingan bisnis, bahkan alat pertikaian, memperebutkan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan partai, seperti menjadikan partai sebagai alat memperebutkan kompetisi sepak bola. (NDUT/PP/KP/H235)

Data (23) merepresentasikan bisnis perdagangan politik yang kerap dilakukan oleh seseorang dalam posisi tinggi sehingga dapat menggunakan uang atau akses yang dimiliki untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan keprofesionalannya dalam bekerja. Hal tersebut disebabkan lemahnya sistem karena struktur, aturan, serta budaya organisasi yang telah mendarah daging. Kelemahan tersebut menimbulkan hambatan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kewenangan badan tata usaha negara.

Konflik kepentingan sering kali dilakukan oleh seseorang yang memiliki rangkap jabatan. Lord Acton (dalam Maulana, 2023) memaparkan tentang teori kekuasaan untuk menyatakan bahwa *"Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely"*, yang artinya seseorang dengan kepemilikan kekuasaan cenderung akan disalahgunakan. Artinya, jika seseorang memiliki jabatan rangkap seperti menteri sekaligus menjabat ketua umum sebuah partai politik, maka mudah sekali memicu munculnya korupsi sebab konflik kepentingan pribadi maupun kelompok. Salah satu contoh kasus konflik kepentingan dilakukan oleh politisi Raja Juli Antoni pada tahun 2022 yang diangkat Presiden sebagai Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atau Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang dan merangkap menjadi pimpinan Partai Solidaritas Indonesia. Dampak rangkap jabatan juga dapat dilihat dalam data berikut.

Data (24)

Mereka sejatinya adalah serigala berbalut jas, dasi mahal, sepatu mengkilat tidak tersentuh debu, dan diantar dengan mobil mewah yang harganya ratusan kali gaji karyawan hierarki terendah mereka. **Penuh semangat bicara tentang regulasi, tata kelola yang baik, tetapi mereka sendiri tidak mau diatur dan dikendalikan. Sepakat tentang penyelamatan dan bantuan global, tetapi mereka sibuk mengais keuntungan** di tengah situasi kacau-balau. (NPB/PP/KP/H12-13)

Data (25)

"Jangan bicara soal kode etik, integritas, dan kejujuran kepadaku, Erik. Ini masih terlalu pagi untuk ceramah. Kita sama-sama tahu, **untuk orang-orang seperti kita, kehormatan adalah omong kosong. Boleh saja kau presentasi tentang good governance, patuhi regulasi, sesuai standar prosedur, membual pada setiap klien, tapi sejatinya kita hidup dari bisnis hipokrasi.**" (NPB/PP/KP/H246)

Data (24) merepresentasikan pejabat dengan sepatu mengkilat, dasi mahal, jas bermerek, dan diantar mobil mewah. Mereka bersemangat ketika membicarakan regulasi dan tata kelola di depan publik, tetapi merekalah sejatinya pelanggar terhebatnya. Mereka sibuk mencari keuntungan pribadi dari jabatan yang telah dimiliki. Tidak peduli dengan nasib buruk rakyatnya dan hanya fokus terhadap profit yang didapatkan. Hal tersebut tidak lain karena rendahnya moral dan etika yang dimiliki. Data (25) menunjukkan bahwa oknum-oknum pejabat yang mempunyai suatu kewenangan, sedang berada pada suatu posisi di mana juga memiliki kepentingan

pribadi atau golongan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap jalannya sistem hukum. Semua ini tidak lain karena niat awal yang salah ketika memasuki politik ataupun mencalonkan diri sebagai seorang pejabat. Penyimpangan tersebut menjadi budaya dan permasalahan yang ditimbulkan terus mengakar.

Seorang politikus menurut Rahmat, dkk. (2020), tidak dapat lepas dari pengawasan partai politik yang mendukungnya untuk duduk di kursi parlemen. Artinya, setiap kebijakan yang diambil juga harus sejalan dengan visi, misi, dan kepentingan partainya. Jika tidak, maka partai politik berhak mengusulkan perubahan anggotanya dari waktu ke waktu (*Recall*) ketika tindakan serta keputusan di parlemen tidak sejalan dengan keinginan partai politik. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dengan demikian, partai politik dapat melakukan pengangkatan kembali secara umum dipahami sebagai pengunduran diri anggota parlemen lama yang diberhentikan dan diganti oleh anggota lainnya sebelum masa jabatan anggota yang dikeluarkan berakhir.

## **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut. Pertama, bentuk patologi ekonomi yang ditemukan adalah *rush money*, *shadow economy*, inflasi, dan pasar non-riil. Keempat bentuk patologi ekonomi itu merepresentasikan gejala persoalan hidup masyarakat modern seiring bertumbuhnya IPTEK. Pasar modal memberikan peluang positif sekaligus negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Positifnya, laju ekonomi mengalami perkembangan pesat sehingga berdampak pada naiknya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Negatifnya, konflik sistem keuangan memiliki resiko tinggi sebab penggelembungan jumlah uang di sektor non-rill. Kedua, bentuk patologi politik yang ditemukan adalah transaksi politik, penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, serta manipulasi dan kamufase. Keempat bentuk patologi politik sering dijumpai di kehidupan nyata tatanan negara yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Patologi politik yang ditemukan dinilai membahayakan negara sebab mengganggu sistem pemerintahan yang berasas jujur dan bersih. Patologi politik berpotensi memicu kasus korupsi sehingga menambah angka Surat Utang Negara (SUN) dan meningkatkan angka kemiskinan maupun pengangguran. Hal tersebut tidak lain karena uang negara yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan lainnya raib dicuri untuk kepentingan pribadi.

Penelitian ini mempunyai implikasi dalam ranah teoretis, yakni memberikan masukan teoritis kepada peneliti lain yang ingin menyelidiki tema serupa dalam karya sastra. Selain itu, dalam ranah praktis, penelitian ini dapat menambah pemahaman pembaca tentang realitas patologi ekonomi dan politik masyarakat modern dalam karya sastra novel. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar memperluas kajian penelitian untuk memperkaya khazanah keilmuan seputar karya sastra.

## **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih diucapkan kepada Universitas Negeri Malang, khususnya Fakultas Sastra, Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S2 PBI UM) atas kesempatan, pengalaman, dan ilmu yang diberikan pada penulis sehingga mampu menyelesaikan artikel penelitian ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih untuk Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.S. dan Dr. Nita Widiati, M.Pd. selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan secara ekstensif dan komprehensif.

## Daftar Pustaka

- Arif, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1-14. <http://moderasi.org/index.php/moderasi/article/view/28>.
- Basri, H. (2020). Pola Praktik Penggunaan Politik Uang dalam Pilkada (Studi Fenomenologis Transaksi Politik dalam Proses Demokrasi Local). *Jurnal Setia Pancasila*, 1(1), 58-69. <http://ejournal.stkipgrisumenep.ac.id/index.php/JSP/article/view/57>.
- Berliana, B., & Suwandi, S. (2021). Disharmoni Manusia dengan Lingkungan dalam Novel O Karya Eka Kurniawan. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 7(2), 256-271. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/article/view/17192>.
- BPS. Inflasi Umum, Inti, Harga yang Diatur Pemerintah, dan Barang Bergejolak Inflasi Indonesia, 2009-2023. <https://www.bps.go.id/statictable/2012/02/02/908/inflasi-umum-inti-harga-yang-diatur-pemerintah-dan-barang-bergejolak-inflasi-indonesia-2009-2021.html>.
- Burlian, P. (2016). *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Candra, E. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Ar-Ribhu*, 4(1), 169-194. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu/article/view/290>.
- Darsono, D., & Aprillia, C. (2020). Patologi Pembangunan Etika Politik Pascareformasi dalam Perspektif Poststrukturalis-hipersemiotik. *Journal of Urban Sociology*, 3(1), 67-82. <https://www.neliti.com/publications/345009/patologi-pembangunan-etika-politik-pascareformasi-dalam-perspektif-poststruktura>.
- Farida, N., & Andalas, E. F. (2019). Representasi Kesenjangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan Perkotaan dalam Novel Gadis Pantai Karya Pramodya Ananta Toer. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(1), 74-90. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/article/view/7447>.
- Finthariasari, M., Febriansyah, E., & Pramadeka, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelangkian Melalui Edukasi dan Literasi Keuangan Pasar Modal Menuju Masyarakat Cerdas Berinvestasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 3(1), 291-298. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/pengabdianbumir/article/view/763>.
- Juliana, M., & Iqbal, M. (2017). Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan oleh Penyidik Polri (Suatu Penelitian di Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 1(1), 113-121. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/5813>
- Khaerunnaila, W. O. F., Negara, T. A. S., & Madjid, A. (2019). Urgensi Pembatasan Masa periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 176-185. Dalam <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/10479>.

- Kistanto, N.H. (2008). Sistem Sosial-Budaya di Indonesia. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 3(2), 1-16. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13221>.
- Maghfiroh, D. L., & Zawawi, M. (2021). Konflik Sosial dalam Novel Aib dan Nasib Karya Minanto Berdasarkan Perspektif George Simmel. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 7(1), 173-197. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/article/view/15634>.
- Makbul, M., Muhammad, Y. A., & Sussang, D. S. (2021). Patologi Sosial dalam Tinjauan Pendidikan Islam dan Solusinya. *Bacaka: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 53-63. <https://ejournal-bacaka.org/index.php/jpai/article/view/15>.
- Malian, S. (2020). Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(1), 102-121. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/5363>.
- Manihuruk, P. J., Eddy, T., & Fauzi, A. (2020). Peran Perbankan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh Nasabah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 325-332. <https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/259>.
- Maulana, R. I. (2023). *Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Pimpinan Partai Politik dengan Menteri Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Skripsi diterbitkan, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Maya, A. (2021). Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 990-996. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43738>.
- Ma'mun, A. R. (2022). Konflik Kepentingan dalam Regulasi Transparansi dan Akuntabilitas Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu Presiden 2019. *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum dan Humaniora*, 1(2), 62-69. <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/histeria/article/view/62-69>.
- Megawulandari, M., Rafli, Z., & Rohman, S. (2019). Patologi Sosial dalam Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya Tere Liye. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2), 85-90. <https://core.ac.uk/download/pdf/231282927.pdf>.
- Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal samudra ekonomika*, 2(1), 53-61. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/view/777>.
- Nufus, K., Triyanto, F., & Muchtar, A. (2019). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC (Studi Kasus PT. Bank BNI (Persero) Tbk). *Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 3(1), 2581-277. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1271328&val=15736&title=Analisis%20Tingkat%20Kesehatan%20Bank%20Dengan%20Metode%20RGEC%20Studi%20Kasus%20PTBank%20BNI%20Persero%20Tbk>.
- Nugraha, D. (2020). The Pinocchio Disease dan Nilai-nilai Antikorupsi. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(2), 156-169. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/article/view/13495>.

- Nurgiyantoro, B. (2013). *Sastra Anak: Pengantar Pemahaman Dunia Anak*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurgiyantoro, B. (2015). *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nuswantaria, I. (2019). Analisis Hegemoni dalam Dwilogi Novel Negeri Para Bedebah Karya Tere Liye (Perspektif Antonio Gramsci). *EDU-KATA*, 5(2), 177-186. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/kata/article/view/1020>.
- Pontianak, Tribun. (2022). *Jumpa Pengarang Tere Liye* [video]. YouTube, <https://www.youtube.com/live/kpgt1wYhLSw?feature=share>
- Puspitarini, R., & Ratnawati, E. (2023). Kerugian Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Pimpinan Bank Pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor Perkara 10/PID. SUS-TPK/2022/PN SMG. *UNES Law Review*, 5(4), 1676-1689. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/468>
- Rahmani, S. (2019). Manajemen Risiko Reputasi dalam Pasar Modal Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 270-282. <https://www.ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/182>.
- Rahmat, R., Hadi, A., & Darmansyah, D. (2020). Konflik Kepentingan Pasca Recall dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2(1), 57-72. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/2205>.
- Salim, A., Fadilla, F., & Purnamasari, A. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 17-28. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/268>.
- Salsabila, S., & Kusumastuti, F. (2021). Framing Media Tentang Influencer Sebagai Jaringan Informasi Pemerintah: Analisis Media Republika. co. id, Detik. com dan Kompas. com Periode Agustus 2020. *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 1(2), 116-123. <http://jurnal.ut.ac.id/index.php/ikomik/article/view/2451>.
- Setiawan, I. (2019). Pengembangan Bisnis Tanpa Riba. *Tahkim*, 13(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/229360705.pdf>.
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Management Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13(3), 327-340. <https://ejurnal.undana.ac.id/JEM/article/download/3311/2166>.
- Subandri, A., Suradi, & Widyarsono, T. (2021). *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiarti, S. (2019). Representasi Konsep Ruang dan Waktu dalam Novel Glonggong Karya Junaedi Setiyono Perspektif Ekologi Budaya. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(2), 262-273. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/article/view/9615>.
- Syuhada, P. A. (2017). Pemberdayaan Pendidikan dalam Mengantisifasi Permasalahan Kehidupan Masyarakat Modern. *AL-QOLAM: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 14-26. <http://journal.staihubbulwathan.id/index.php/alqolam/article/view/342>.
- Utari, D. & Prawironegoro, D. (2017). *Pengantar Sosiologi: Kajian Perilaku Sosial dalam Sejarah Perkembangan Masyarakat*. Jakarta: Mitra Wacana Media.